



SINKRONISASI PEMDA DIY DAN PEMKOT YOGYA

Sekber Kawasan Keistimewaan Pengambil Keputusan

YOGYA (KR) - Kehadiran Sekretariat Bersama (Sekber) Kawasan Keistimewaan dipastikan tidak bertabrakan atau tumpang tindih dengan unit-unit kerja yang telah ada di Pemerintah Daerah (Pemda) DIY maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Sekber Kawasan Keistimewaan merupakan pengambil keputusan bersama sebagai wujud berjalannya sinkronisasi antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Drs Tavip Agus Riyanto MSi kepada KR, Jumat (8/9). Sekber Kawasan Keistimewaan tersebut akan menangani kawasan Malioboro, Kraton Yogyakarta, Kotabaru, Kadipaten Pakualaman, Kota-gede dan Krapyak.

"Sekber ini bukan merupakan eksekutor di lapangan," namun hanya memusyawarahkan apa yang akan dibagikan di kawasan perkotaan Yogyakarta yang didanai dari provinsi maupun kota atau sesuai konteksnya dan sub-

stansinya," ujar Tavip.

Tavip menjelaskan, Sekber Kawasan Keistimewaan ini melibatkan Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta dengan pelaksana teknis tetap berada di Pemkot dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait. Semisal tentang infrastruktur ditangan Dinas PUP-ESDM, transportasi ditangani Dinas Perhubungan dan sebagainya. Jadi Sekber bukan pelaksana tugas di lapangan hanya sebagai pengambil keputusan.

"Guna mensinkronkan dan menyepakati siapa berbuat apa atau pembagian peran ketugasan antara Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta itulah dibentuk wadah dalam Sekber Kawasan Keistimewaan ini. Diharapkan Sekber sudah bisa berjalan tugasnya pasca dibentuk September ini," tandas Tavip.

Sekber Kawasan Keistimewaan tersebut sesuai arahan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, diminta tidak usah melibatkan terlalu banyak pihak. Arahannya hanya yang punya kekuatan sebagai pengambil kebijakan duduk dalam Sekber. Artinya, apabila di Sekber akan ada pos pelayanan kesehatan tetapi

Dinas Kesehatan tidak harus duduk di Sekber sebab bisa saja Sekber yang memutuskan dan Dinkes melaksanakan.

"Bayangannya ada Gubernur dan Walikota dalam konteks sebagai pengarah dalam Sekber. Sedangkan dalam konteks kelompok kerja (Pokja) ada yang menyangkut penanganan infrastruktur, transportasi dan sebagainya. Instansi yang dipilih dalam Sekber adalah instansi pokok saja, selebihnya sebagai pelaksana bukan pengambil kebijakan," ungkap Tavip.

Perjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY,

san Keistimewaan tersebut. Sebagai Pokja infrastruktur dalam Sekber tersebut, pihaknya hanya akan fokus menangani kawasan-kawasan keistimewaan.

"Sebenarnya untuk ketugasan tetap sama dengan peran instansi selama ini baik di provinsi dan kota, hanya saja dengan kehadiran Sekber tersebut perannya akan semakin fokus untuk mengkoordinasikan kegiatan di keistimewaan DIY. Terutama sekawanan di perkotaan Yogyakarta yang tengah diprioritaskan sehingga Sekber lebih mengutamakan fungsi koordinasi supaya lebih fokus penanganan dan pemeliharannya," ungkap Hananto yang

Instansi	Tinjauan										
1. UPT. Malioboro	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">anjut</td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">anggapi</td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">ahui</td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>		anjut		anggapi		ahui				
		anjut									
		anggapi									
		ahui									
2. Dinas Kebudayaan											
3.											
4.											
5.											

✓ Netral
✓ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005